



REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
FEDERASI RUSIA
TENTANG
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA**

Republik Indonesia dan Federasi Rusia selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"

MENGAKUI hubungan persahabatan dan kerja sama antara Para Pihak,

BERKEINGINAN memberikan kerangka hukum untuk kerja sama yang lebih efektif antara Para Pihak dalam memberantas kejahatan,

BERMAKSUD untuk saling memberikan kerja sama yang seluas-luasnya dalam lingkup bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana melalui pembentukan Perjanjian ini,

BERDASARKAN penghormatan kepada kedaulatan dan integritas wilayah, noninterferensi urusan dalam negeri, dan saling menguntungkan,

TELAH MENYETUJUI hal-hal berikut:

Pasal 1

Kewajiban untuk memberikan bantuan hukum

1. Para Pihak wajib, berdasarkan Perjanjian ini, saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (selanjutnya disebut sebagai "bantuan hukum").
2. Bantuan hukum diberikan sesuai dengan Perjanjian ini jika tindak pidana yang dimaksud, terkait dengan permintaan yang telah diajukan, dapat dipidana menurut hukum Para Pihak. Pihak Diminta dapat, menurut pertimbangannya sendiri, memberikan bantuan hukum juga dalam hal tindak pidana, yang terkait dengan permintaan bantuan hukum yang telah diterima, tidak dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangannya.
3. Tujuan dari Perjanjian ini adalah secara eksklusif memberikan bantuan hukum dari satu Pihak ke Pihak lainnya. Ketentuan dari Perjanjian ini tidak akan menimbulkan hak bagi seseorang atau subyek hukum untuk memperoleh atau mengecualikan bukti lain atau untuk mencegah dilaksanakannya permintaan.
4. Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada otoritas berwenang dari satu Pihak untuk melaksanakan haknya di wilayah kekuasaan Pihak lain karena kewenangan tersebut secara eksklusif berada di Pihak lainnya.
5. Perjanjian ini berlaku untuk permintaan bantuan hukum, yang diajukan setelah berlakunya Perjanjian ini termasuk perbuatan atau pembiaran yang dilakukan sebelum tanggal ini.
6. Bantuan hukum juga dapat diberikan sehubungan dengan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan atau proses hukum terkait tindak pidana di bidang perpajakan/fiskal dan bea cukai.

Pasal 2
Lingkup penerapan Perjanjian

1. Bantuan hukum meliputi:
 - a. penyampaian dokumen prosedural;
 - b. pengambilan bukti;
 - c. pencarian lokasi dan pengidentifikasian orang dan barang;
 - d. permintaan kehadiran secara sukarela dari saksi, korban dan ahli di hadapan otoritas berwenang Pihak Peminta;
 - e. pemindahan sementara orang yang berada dalam tahanan atau narapidana untuk ikut dalam proses peradilan pidana di wilayah Pihak Peminta sebagai saksi dan korban atau untuk tujuan proses peradilan pidana lainnya yang disebutkan dalam permintaan;
 - f. mengambil langkah-langkah untuk membekukan, menahan, menyita, dan merampas hasil kejahatan dan sarana untuk melakukan tindak pidana;
 - g. pemindahan dokumen, barang dan bukti lain;
 - h. pemberian izin kepada perwakilan dari otoritas berwenang dari Pihak Peminta untuk hadir pada pelaksanaan permintaan;
 - i. penggeledahan dan penyitaan;
 - j. pemberian informasi, dokumen, dan benda;
 - k. bantuan hukum lain sesuai dengan tujuan dari Perjanjian ini dan tidak bertentangan dengan hukum Pihak Diminta.

2. Perjanjian ini tidak berlaku terhadap:
 - a. penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan mengekstradisi orang tersebut;
 - b. pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman; dan
 - c. Pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.

Pasal 3

Otoritas Pusat dan Otoritas Berwenang

1. Dalam rangka menyediakan kerja sama yang baik antara Para Pihak dalam kerangka Perjanjian ini, maka perlu ditunjuk Otoritas Pusat bagi Para Pihak.

Otoritas Pusat untuk Republik Indonesia adalah:

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Otoritas Pusat untuk Federasi Rusia adalah:

Kementerian Kehakiman Federasi Rusia untuk permintaan terkait dengan proses persidangan di pengadilan Federasi Rusia;

Kantor Jaksa Agung untuk segala bentuk tujuan lain dari pemberian bantuan hukum.

2. Otoritas berwenang adalah otoritas yang diberikan kewenangan oleh masing-masing Pihak untuk melaksanakan bantuan hukum yang diminta.
3. Para Pihak harus segera memberitahukan satu sama lain melalui saluran diplomatik apabila terdapat perubahan Otoritas Pusat dan otoritas berwenangnya.
4. Otoritas Pusat dari Para Pihak harus langsung mengirimkan dan menerima semua permintaan bantuan hukum yang diatur dalam Perjanjian ini dan memberikan tanggapannya kepada mereka.
5. Otoritas Pusat Para Pihak harus melaksanakan permintaan bantuan hukum secara langsung atau mengirimkan kepada otoritas berwenang untuk melaksanakannya.

Apabila Otoritas Pusat meneruskan permintaan untuk melaksanakan bantuan kepada otoritas berwenang, maka Otoritas Pusat harus memastikan pelaksanaan permintaan yang cepat dan tepat oleh otoritas berwenang tersebut.

Pasal 4
Bentuk dan isi permintaan

1. Permintaan bantuan hukum harus dilakukan secara tertulis.
2. Pihak Diminta harus segera menerima permintaan bantuan pada saat penyampaian permintaannya dilakukan melalui teleks, faksimili, surat elektronik atau jenis komunikasi lainnya, dan permintaan asli harus segera disampaikan setelahnya oleh Pihak Peminta. Pihak Diminta harus memberitahu Pihak Peminta tentang hasil pelaksanaan permintaan hanya setelah permintaan asli diterima.
3. Permintaan bantuan hukum harus mencakup:
 - a. nama otoritas berwenang yang meminta bantuan hukum;
 - b. tujuan permintaan dan deskripsi bantuan hukum yang diminta;
 - c. uraian tindak pidana yang terkait dengan permintaan, penyelidikan dan penyidikan, atau proses hukum yang dilakukan, jenis tindak pidana, salinan aturan hukum yang berlaku, yang kejahatannya dapat dikenai sanksi pidana, dan juga jika memungkinkan sifat dan tingkat kerugian akibat tindak pidana ini;
 - d. alasan penggunaan dan deskripsi prosedur tertentu yang diminta oleh Pihak Peminta untuk diikuti dalam pelaksanaan permintaan;
 - e. identitas orang-orang yang menjadi subyek permintaan, penyelidikan dan penyidikan atau proses hukum;
 - f. batas waktu pemenuhan permintaan tersebut yang diinginkan oleh Pihak Peminta;
 - g. identitas, termasuk nama lengkap, nama keluarga (nama tengah) dan alamat dan juga, jika memungkinkan, nomor telepon dari orang-orang yang akan diberi tahu dan hubungannya dengan penyelidikan dan penyidikan atau proses hukum yang sedang berjalan;
 - h. indikasi lokasi dan deskripsi tempat, di mana pemeriksaan dan penggeledahan diperlukan, dan barang yang akan disita;
 - i. pertanyaan yang akan diajukan untuk mengumpulkan bukti di Pihak Diminta;

- j. apabila terdapat indikasi bahwa kehadiran perwakilan dari otoritas yang berwenang dari Pihak Peminta diperlukan, nama lengkap dan jabatan serta alasan kehadiran mereka;
 - k. kebutuhan, jika ada, untuk merahasiakan fakta bahwa permintaan tersebut diterima terkait isinya dan/atau tindakan yang dilakukan sehubungan dengan permintaan tersebut;
 - l. informasi lain yang mungkin berguna bagi Pihak Diminta untuk melaksanakan permintaan tersebut.
4. Jika Pihak Diminta mempertimbangkan bahwa informasi yang terdapat dalam permintaan tersebut tidak cukup untuk pelaksanaannya, Pihak tersebut dapat meminta informasi tambahan.

Pasal 5

Bahasa

Permintaan bantuan hukum, dokumen pendukungnya, dan informasi tambahan yang diteruskan sesuai dengan Perjanjian ini harus disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa Pihak Diminta, atau sesuai dengan persetujuan awal Otoritas Pusat Para Pihak, ke dalam bahasa Inggris. Prosedur yang sama harus diterapkan pada dokumen dan informasi yang diteruskan untuk menanggapi permintaan tersebut.

Pasal 6

Penolakan atau penundaan permintaan

1. Bantuan hukum harus ditolak jika:
 - a. pelaksanaan permintaan akan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum atau kepentingan dasar lain Pihak Diminta;
 - b. pelaksanaan permintaan bertentangan dengan hukum Pihak Diminta atau tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;
 - c. permintaan berkaitan dengan tindak pidana di Pihak Peminta yang tersangkanya telah dihukum atau dibebaskan di Pihak Diminta untuk tindak pidana yang sama, atau yang telah melewati batas waktu;

- d. permintaan berkaitan dengan kejahatan yang diatur dalam hukum militer yang bukan merupakan kejahatan dalam hukum pidana umum;
 - e. Pihak Diminta memiliki alasan yang kuat untuk meyakini bahwa permintaan yang diajukan untuk menuntut orang atas dasar ras, gender, kepercayaan, kewarganegaraan, suku atau pandangan politik, atau jabatan orang yang disangkakan karena alasan-alasan dimaksud.
2. Kerahasiaan bank atau kerahasiaan perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai alasan mutlak untuk menolak pemenuhan bantuan hukum.
 3. Bantuan hukum dapat ditunda atau ditolak oleh Pihak Diminta jika pelaksanaan permintaan akan membahayakan atau menghambat penyelidikan dan penyidikan atau proses hukum yang tengah berjalan di wilayah Pihak Diminta.
 4. Sebelum memutuskan untuk menunda atau menolak pelaksanaan permintaan, Pihak Diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan hukum dapat diberikan berdasarkan kondisi tertentu, yang dianggap perlu. Apabila Pihak Peminta menerima bantuan hukum berdasarkan kondisi ini, Pihak Peminta wajib mematuhi.
 5. Jika Pihak Diminta memutuskan untuk menunda pelaksanaan, atau menolak pemenuhan permintaan, Pihak Diminta harus segera menginformasikan kepada Pihak Peminta melalui Otoritas Pusat beserta alasan keputusannya.

Pasal 7

Keabsahan Dokumen

1. Dokumen yang dikirim berdasarkan perjanjian ini dan disahkan dengan stempel otoritas berwenang atau Otoritas Pusat Pihak pengirim dapat diterima sebagai bukti tanpa pengesahan atau bentuk sertifikasi lain.

2. Atas permintaan Pihak Peminta, dokumen yang dikirimkan dalam cakupan Perjanjian ini, dapat disertifikasi dalam bentuk lain, sebagaimana tercantum dalam permintaan yang disampaikan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Pihak Diminta.
3. Untuk tujuan Perjanjian ini, dokumen yang dianggap resmi dalam wilayah salah satu Pihak harus dianggap sama seperti di wilayah Pihak lainnya.

Pasal 8

Kerahasiaan dan pembatasan penggunaan informasi

1. Pihak Diminta berdasarkan permintaan Otoritas Pusat Pihak Peminta harus merahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangnya atas fakta penerimaan permintaan bantuan hukum, konten, atau tindakan lain yang diambil berdasarkan permintaan kecuali kondisi saat pelanggaran kerahasiaan permintaan diperlukan untuk pelaksanaan permintaan. Apabila pelaksanaan permintaan perlu mengecualikan batasan kerahasiaan, Pihak Diminta harus secara tertulis meminta persetujuan dari Pihak Peminta, yang tanpanya permintaan tidak dapat dilaksanakan.
2. Pihak Peminta tidak menggunakan informasi atau bukti yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak Diminta untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan bantuan hukum.
3. Dalam hal Pihak Peminta perlu membuka dan menggunakan seluruh atau sebagian informasi atau bukti untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan, Pihak Peminta harus meminta persetujuan Pihak Diminta yang dapat menerima atau menolak seluruh atau sebagian persetujuan tersebut, jika memungkinkan.

Pasal 9

Pelaksanaan permintaan bantuan hukum

1. Permintaan bantuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan hukum Pihak Diminta dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
Atas permintaan Pihak Peminta, Pihak Diminta harus memberikan bantuan hukum dalam bentuk dan sesuai dengan prosedur khusus yang tercantum dalam permintaan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Pihak Diminta.
2. Apabila Pihak Peminta meminta kehadiran perwakilan otoritas berwenangnya dalam pelaksanaan permintaan, Pihak Diminta akan menginformasikan keputusannya kepada Pihak Peminta. Apabila setuju, Pihak Peminta akan diinformasikan sebelumnya terkait waktu dan tempat pelaksanaan permintaan.
3. Otoritas Pusat Pihak Diminta akan mengirimkan informasi dan bukti yang diterima sesuai permintaan dengan tepat waktu kepada Otoritas Pusat Pihak Peminta.
4. Jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan permintaan secara penuh atau sebagian, Otoritas Pusat Pihak Diminta akan segera menginformasikan Otoritas Pusat Pihak Peminta atas ketidakmungkinan tersebut beserta alasannya.

Pasal 10

Penyampaian Dokumen

1. Berdasarkan permintaan bantuan hukum, Otoritas Pusat Pihak Diminta harus segera melaksanakan atau mengatur penyampaian dokumen prosedural.

2. Pihak Peminta harus mengirimkan permintaan untuk menyampaikan dokumen berkenaan dengan respons atau kehadiran di wilayah Pihak Peminta dalam jangka waktu yang wajar, sebelum respons atau kehadiran yang telah dijadwalkan.
3. Pelaksanaan permintaan tersebut harus dikonfirmasi dengan dokumen penyampaian yang mencantumkan tanggal dan tanda tangan orang yang dituju atau pernyataan otoritas berwenang Pihak Diminta, dengan konfirmasi, tanggal, dan cara penyampaiannya. Pihak Peminta harus segera diinformasikan mengenai penyampaian dokumen tersebut.

Pasal 11

Pengambilan bukti di tempat Pihak Diminta

1. Sesuai dengan hukumnya, Pihak Diminta dalam wilayahnya harus mengambil keterangan saksi, korban, dan ahli atau menghasilkan dokumen, benda dan bukti yang dinyatakan dalam permintaan dan mengirimkannya kepada Pihak Peminta.
2. Perwakilan otoritas berwenang Pihak Peminta yang hadir dalam pelaksanaan permintaan harus diizinkan untuk menyusun pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang dimaksud melalui perwakilan otoritas berwenang Pihak Diminta.
3. Pihak Peminta harus memperhatikan setiap syarat yang diterapkan oleh Pihak Diminta berkaitan dengan setiap dokumen dan barang yang akan dikirimkan, termasuk persyaratan perlindungan kepentingan pihak ketiga atas setiap dokumen dan barang tersebut.
4. Berdasarkan permintaan Pihak Diminta, Pihak Peminta harus, sesegera mungkin, mengembalikan dokumen dan benda asli yang dikirim berdasarkan ayat 1 dalam Pasal ini.

Pasal 12

Pemberian informasi, dokumen dan barang

1. Pihak Diminta harus memberikan kepada Pihak Peminta salinan dokumen dan informasi dari otoritas Pemerintahan, yang dapat diakses publik berdasarkan hukum yang berlaku di Pihak Diminta.
2. Pihak Diminta dapat, berdasarkan hukumnya, memberikan kepada Pihak Peminta informasi, dokumen dan barang milik lembaga atau instansi pemerintah yang tidak terbuka untuk publik, dengan dan berdasarkan persyaratan yang sama sebagaimana bagi lembaga penegak hukum dan peradilan Pihak Diminta.

Pasal 13

Penggeledahan dan Penyitaan

1. Pihak Diminta harus, selama diizinkan berdasarkan hukumnya, melaksanakan permintaan untuk menggeledah, menyita, dan mengirimkan bahan ke Pihak Peminta yang berkaitan dengan suatu penyelidikan dan penyidikan atau proses hukum lain untuk masalah pidana yang tertunda di Pihak Peminta, sepanjang permintaan itu mencakup informasi yang cukup untuk membenarkan tindakan tersebut sesuai dengan hukum Pihak Diminta.
2. Pihak Diminta harus memberikan informasi tersebut sebagaimana diminta oleh Pihak Peminta mengenai hasil dari setiap penggeledahan, tempat penyitaan, keadaan penyitaan, dan penahanan selanjutnya dari bahan yang disita.
3. Pihak Peminta harus memperhatikan setiap syarat yang diberlakukan oleh Pihak Diminta dalam hubungannya dengan bahan yang disita yang dikirimkan kepada Pihak Peminta.

Pasal 14

Lokasi dan identifikasi orang dan barang

Otoritas berwenang Pihak Diminta harus menggunakan upaya terbaiknya sebagaimana ditentukan oleh hukumnya untuk memastikan lokasi dan identitas orang dan barang yang disebutkan dalam permintaan.

Pasal 15

Permintaan untuk menghadirkan saksi, korban, dan ahli di wilayah Pihak Peminta

1. Apabila Pihak Peminta mengajukan permintaan menghadirkan orang untuk menghasilkan bukti, melakukan pemeriksaan ahli, atau tindakan prosedural lain dalam wilayahnya, Pihak Diminta harus memberitahukan orang yang diminta tersebut untuk menghadap otoritas berwenang Pihak Peminta.
2. Permintaan untuk menghadirkan orang tersebut harus berisi informasi mengenai syarat dan ketentuan untuk menanggung biaya dan pengeluaran terkait dengan kehadiran orang yang dipanggil serta daftar jaminan yang akan diberikan kepada orang tersebut berdasarkan Pasal 16 Perjanjian ini.
3. Permintaan untuk menghadirkan orang tersebut tidak mengandung ancaman penggunaan tindakan pemaksaan atau ancaman hukuman apabila orang tersebut tidak hadir di wilayah Pihak Peminta
4. Orang yang dipanggil akan memutuskan untuk hadir secara sukarela. Otoritas Pusat Pihak Diminta harus segera memberitahukan kesediaan dari orang tersebut kepada Otoritas Pusat Pihak Peminta.

Pasal 16

Tindakan jaminan keselamatan

1. Seseorang yang hadir di hadapan otoritas berwenang Pihak Peminta terlepas dari kewarganegaraannya tidak dikenai tuntutan pidana atau

tanggung jawab administratif, ditahan, atau dikenai pembatasan lainnya atas kebebasan pribadi atau hukuman di wilayah Pihak Peminta atas setiap tindakan yang dilakukan sebelum orang tersebut masuk ke dalam wilayah Pihak Peminta.

2. Orang yang dipanggil tersebut akan kehilangan hak untuk tidak diganggu gugat sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini apabila orang tersebut meskipun setelah bebas untuk pergi meninggalkan wilayah Pihak Peminta, tetapi tidak meninggalkan wilayah Pihak Peminta dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah diberitahukan secara tertulis bahwa kehadiran orang tersebut sudah tidak diperlukan lagi oleh otoritas berwenang yang relevan atau, telah meninggalkan wilayah Pihak Peminta, tetapi kembali secara sukarela.
3. Orang yang dipanggil tersebut tidak dipaksa untuk memberikan bukti untuk kasus selain dari yang dinyatakan dalam permintaan.

Pasal 17

Pemindahan sementara orang yang berada dalam tahanan (termasuk narapidana)

1. Seseorang yang berada dalam tahanan (termasuk narapidana) terlepas dari kewarganegaraannya, dengan persetujuan dari Otoritas Pusat Pihak Diminta dapat dipindahkan sementara waktu ke Pihak Peminta untuk memberikan kesaksian sebagai saksi atau korban atau untuk membantu dalam proses lainnya yang disebutkan dalam permintaan dengan ketentuan bahwa orang tersebut dikembalikan kepada Pihak Diminta dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pihak Diminta.
2. Jangka waktu awal untuk orang tersebut dipindahkan tidak lebih dari 90 hari. Atas permintaan dari Otoritas Pusat Pihak Peminta, berdasarkan alasan yang kuat, jangka waktu tinggal dari orang yang dipindahkan tersebut dapat diperpanjang oleh Otoritas Pusat Pihak Diminta.

3. Perintah dan persyaratan mengenai pemindahan dan pengembalian orang tersebut harus dikoordinasikan oleh Otoritas Pusat para pihak.
4. Pemindahan orang ditolak:
 - a. apabila seseorang dalam tahanan (termasuk narapidana) tidak memberikan persetujuan secara tertulis terkait pemindahan ini;
 - b. apabila partisipasi orang tersebut diperlukan dalam proses pidana di wilayah Pihak Diminta;
 - c. apabila pemindahan memperpanjang masa tahanan (jangka waktu pemenjaraan) orang tersebut.
5. Pihak Peminta harus menahan orang yang dipindahkan dalam tahanan sepanjang keputusan otoritas berwenang Pihak Peminta untuk menahan orang tersebut masih berlaku. Dalam hal dilepasnya orang dalam tahanan tersebut atas keputusan Pihak Diminta, Pihak Peminta akan melaksanakan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Perjanjian ini yang berkaitan dengan orang tersebut.
6. Jangka waktu pemindahan orang di luar wilayah Pihak Diminta dianggap sebagai bagian dari penahanan (termasuk pelaksanaan hukuman penjara).
7. Apabila seseorang dalam tahanan (termasuk narapidana) tidak setuju untuk hadir di hadapan Pihak Peminta karena alasan tertentu tidak dikenai upaya paksa atau hukuman apapun.

Pasal 18

Pelindungan orang yang hadir atas permintaan atau pemindahan ke wilayah Pihak Peminta

Apabila diperlukan, Pihak Peminta harus memberikan pelindungan terhadap orang yang hadir atas permintaan atau pemindahan ke wilayahnya sesuai dengan Pasal 15 dan 17 Perjanjian ini.

Pasal 19

Kasus khusus pemberian bantuan hukum

Pihak Diminta harus menyerahkan ringkasan berkas perkara pidana dan/atau dokumen dan benda terkait dengan kasus tersebut yang diperlukan untuk penyelidikan dan penyidikan dan/atau proses hukum apabila diminta, jika otoritas berwenang dapat menerimanya dalam kasus yang serupa, kecuali dokumen atau benda yang berisi rahasia Negara.

Pasal 20

Pelaksanaan tindakan pembekuan, penyitaan, penahanan, dan perampasan hasil tindak pidana dan sarana untuk melakukan tindak pidana

1. Para Pihak, sesuai dengan hukumnya masing-masing, harus saling membantu dalam menelusuri, membekukan, menyita, menahan, dan merampas hasil dan sarana untuk melakukan tindak pidana.

Untuk tujuan dari Perjanjian ini, "hasil tindak pidana" adalah harta kekayaan termasuk dana moneter atau kekayaan lainnya yang berasal dari tindak pidana, secara langsung atau tidak langsung, pendapatan, atau keuntungan lain yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut atau harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana yang telah dikonversi atau diubah, atau harta kekayaan yang bercampur dengan hasil tindak pidana.

2. Pihak Diminta harus, atas permintaan, berusaha untuk memastikan adanya hasil atau instrumen tindak pidana berada di wilayah yurisdiksinya, memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada Pihak Peminta dan mengambil tindakan untuk mengungkapkan dana moneter dan properti tersebut, menelusuri operasi finansial dan menerima setiap informasi atau bukti lainnya yang dapat memfasilitasi pengamanan dari pengembalian hasil tindak pidana. Dalam pembuatan permintaan, Pihak Peminta harus

memberitahukan Pihak Diminta dasar dari keyakinannya bahwa hasil atau instrumen suatu tindak pidana terletak di wilayahnya.

3. Di mana, berdasarkan ayat 2 Pasal ini, hasil atau instrumen tindak pidana yang dicurigai ditemukan, Pihak Diminta harus atas permintaan memberlakukan perintah penahanan atau pembekuan yang dibuat oleh otoritas berwenang Pihak Peminta, atau mengambil tindakan sebagaimana diizinkan oleh hukumnya untuk mencegah adanya transaksi, pengalihan atau penghilangan hasil atau instrumen tindak pidana yang dicurigai, sambil menunggu keputusan akhir sehubungan dengan hasil atau instrumen tindak pidana tersebut oleh pengadilan Pihak Peminta atau Pihak Diminta.
4. Pihak Diminta harus, sejauh diizinkan oleh hukumnya, memberlakukan putusan akhir yang dibuat oleh otoritas berwenang Pihak Peminta atas penyitaan atau perampasan hasil tindak pidana, dana moneter atau properti lain yang diterima sebagai hasil tindak pidana, penghasilan, atau manfaat lainnya dari hasil tindak pidana tersebut, atau properti hasil tindak pidana tersebut dikonversi atau diubah, atau properti hasil penggabungan tindak pidana, atau instrumen tindak pidana.
Ketentuan Pasal ini juga berlaku untuk keputusan atas perampasan yang dihasilkan dalam proses pidana, administrasi dan perdata.
5. Dalam penerapan Pasal ini, hak dari pihak ketiga beritikad baik harus dihormati berdasarkan hukum Pihak Diminta.
6. Atas permintaan Pihak Peminta, Pihak Diminta dapat, sejauh diizinkan oleh hukumnya dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh Otoritas Pusat masing-masing Pihak, memindahkan hasil atau instrumen tindak pidana kepada Pihak Peminta.

Pasal 21

Biaya

1. Pihak Diminta harus menanggung biaya pelaksanaan permintaan bantuan hukum, kecuali yang harus ditanggung Pihak Peminta:
 - a. biaya terkait dengan perjalanan orang ke dan dari wilayahnya sesuai dengan Pasal 15 dan 17 Perjanjian ini dan kehadiran mereka di wilayah tersebut, demikian juga biaya lain termasuk yang timbul sehubungan dengan perlindungan orang tersebut dan pembayaran karena orang tersebut;
 - b. biaya dan honorarium ahli;
 - c. biaya yang terkait dengan perjalanan dan kehadiran dari perwakilan otoritas berwenang Pihak Peminta saat pelaksanaan permintaan sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 Perjanjian ini;
 - d. biaya yang terkait dengan pemindahan barang-barang dari wilayah Pihak Diminta ke wilayah Pihak Peminta dan sebaliknya.

2. Apabila pelaksanaan permintaan membutuhkan biaya yang sangat besar atau yang sifatnya luar biasa, Otoritas Pusat Para Pihak harus berkonsultasi untuk menentukan syarat dan ketentuan agar bantuan yang diminta dapat diberikan, demikian juga pengaturan mengenai biaya.

Pasal 22

Konsultasi dan penyelesaian sengketa

1. Para Pihak atas permintaan salah satu dari mereka harus berkonsultasi mengenai interpretasi atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, baik secara umum maupun dalam hubungannya dengan permintaan tertentu.

2. Sengketa yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan Perjanjian ini harus diselesaikan melalui negosiasi diplomatik.

Pasal 23
Ketentuan Akhir


1. Dengan kesepakatan Para Pihak, Perjanjian ini dapat diamendemen dan amendemen tersebut dapat berlaku sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini.
2. Perjanjian ini berlaku 30 hari setelah tanggal terakhir Para Pihak saling memberi tahu melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan hukum nasional masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini telah terpenuhi.
3. Perjanjian ini berakhir 180 hari setelah tanggal salah satu Pihak menerima melalui saluran diplomatik pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya atas maksud untuk mengakhirkan perjanjian ini.
4. Pengakhiran Perjanjian ini tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak melaksanakan permintaan bantuan hukum yang diterima sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.


SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Negara mereka masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Moskow pada hari ke-13 bulan Desember 2019, dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia, dan bahasa Inggris; semua naskah adalah autentik. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA

UNTUK FEDERASI RUSIA


YASONNA H. LAOLY
MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA


ALEKSANDR KONOVALOV
MENTERI KEHAKIMAN



REPUBLIK INDONESIA

**ДОГОВОР
МЕЖДУ
РЕСПУБЛИКОЙ ИНДОНЕЗИЕЙ
И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
О
ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ**

Республика Индонезия и Российская Федерация, далее именуемые Сторонами,

принимая во внимание существующие между Сторонами дружеские связи и сотрудничество,

желая обеспечить более эффективное сотрудничество между Сторонами в области борьбы с преступностью,

намереваясь расширять сотрудничество в области оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам путем заключения настоящего Договора,

основываясь на принципах суверенного равенства, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и взаимной выгоды,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Обязательство по оказанию правовой помощи

1. Стороны в соответствии с настоящим Договором оказывают друг другу взаимную правовую помощь по уголовным делам (далее - правовая помощь).
2. Правовая помощь оказывается в соответствии с настоящим Договором, если деяние, в связи с которым поступил запрос, является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих Сторон. Запрашиваемая Сторона может по своему усмотрению оказать правовую помощь также в случае, если деяние, в связи с которым поступил запрос, не является уголовно наказуемым согласно ее законодательству.
3. Настоящий Договор имеет целью исключительно оказание одной Стороной правовой помощи другой Стороне. Положения настоящего Договора не ведут к возникновению у каких-либо физических и юридических лиц права получать или исключать доказательства либо препятствовать исполнению запроса о правовой помощи.
4. Настоящий Договор не предоставляет компетентным органам одной из Сторон права осуществлять на территории другой Стороны полномочия, которые отнесены исключительно к компетенции органов другой Стороны.
5. Настоящий Договор применяется в отношении запросов о правовой помощи, поступивших после вступления в силу настоящего Договора, даже если они связаны с преступлением, совершенным до вступления в силу настоящего Договора.
6. Правовая помощь может также предоставляться в связи с расследованиями, уголовным преследованием или судебным разбирательством в отношении налоговых (финансовых) и таможенных преступлений.

Статья 2
Объем правовой помощи

1. Правовая помощь включает в себя:

- a) вручение процессуальных документов;
- b) получение доказательств;
- c) установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов;
- d) вызов свидетелей, потерпевших и экспертов для их добровольной явки в компетентный орган запрашивающей Стороны;
- e) передачу на время лиц, содержащихся под стражей или отбывающих наказание в виде лишения свободы, для участия в уголовном судопроизводстве на территории запрашивающей Стороны в качестве свидетелей, потерпевших или для производства иных процессуальных действий, указанных в запросе о правовой помощи;
- f) осуществление мер по замораживанию, изъятию, аресту, конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности, и средств совершения преступления;
- g) передачу документов, предметов и иных доказательств;
- h) предоставление разрешения на присутствие при исполнении запроса о правовой помощи представителей компетентных органов запрашивающей Стороны;
- i) обыск и выемку;
- j) предоставление информации, документов и предметов;
- k) любые другие виды правовой помощи в соответствии с целями настоящего Договора, не противоречащие законодательству запрашиваемой Стороны.

2. Настоящий Договор не применяется в отношении:

- a) ареста или задержания любого лица с целью выдачи этого лица;
- b) передачи осужденных для отбывания наказания;
- c) передачи судопроизводства по уголовным делам.

Статья 3

Центральные и компетентные органы

1. В целях обеспечения надлежащего сотрудничества Сторон в рамках настоящего Договора назначаются центральные органы Сторон, которыми являются:

от Индонезийской Стороны - Министерство юстиции и по правам человека Республики Индонезии.

от Российской Стороны:

Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам, связанным с деятельностью судов Российской Федерации;

Генеральная прокуратура Российской Федерации - по всем иным вопросам оказания правовой помощи;

2. Компетентными органами являются органы Сторон, уполномоченные каждой из Сторон на осуществление тех или иных действий, являющихся предметом запроса о правовой помощи.
3. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам об изменении своих центральных органов и сферы их компетенции.
4. Центральные органы Сторон непосредственно направляют и получают запросы о правовой помощи и ответы на них.
5. Центральный орган запрашиваемой Стороны исполняет запрос о правовой помощи непосредственно или направляет его для выполнения компетентному органу.

Если центральный орган запрашиваемой Стороны направляет запрос о правовой помощи для исполнения компетентному органу, он содействует оперативному и надлежащему исполнению запроса этим компетентным органом.

Статья 4

Форма и содержание запроса о правовой помощи

1. Запрос о правовой помощи составляется в письменной форме.
2. Запрашиваемая Сторона принимает к исполнению запрос о правовой помощи немедленно после его получения по телексу, факсу, электронной почте или другому подобному виду связи, при этом запрашивающая Сторона в возможно более короткий срок представляет оригинал запроса. Запрашиваемая Сторона информирует запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса о правовой помощи только при условии получения его оригинала.
3. Запрос о правовой помощи содержит:
 - a) наименование компетентного органа, запрашивающего правовую помощь;
 - b) цель запроса и описание запрашиваемой правовой помощи;
 - c) описание деяния, в связи с которым проводится проверка сообщения о преступлении, расследование или судебное разбирательство, его юридическую квалификацию, текст закона, в соответствии с которым деяние является уголовно наказуемым, а также (по возможности) характер и размер ущерба, причиненного в результате этого деяния;
 - d) обоснование применения и описание особых процедур, которые запрашивающая Сторона просит применить при исполнении запроса;
 - e) данные, идентифицирующие лиц, в отношении которых проводится проверка сообщения о преступлении, расследование или судебное разбирательство;
 - f) желаемый для запрашивающей Стороны срок исполнения запроса;
 - g) полные фамилии, имена (отчества) и адреса, а также (по возможности) номера телефонов лиц, которые должны быть уведомлены, и их отношение к ведущемуся расследованию или судебному разбирательству;
 - h) указание на расположение и описание места, где необходимо произвести осмотр и обыск, а также предметов, подлежащих изъятию;
 - i) вопросы, которые необходимо задать для получения показаний на территории запрашиваемой Стороны;

- ж) в случае просьбы о присутствии при исполнении запроса представителей компетентных органов запрашивающей Стороны - их полные имена, должности и обоснование необходимости их присутствия;
- к) в случае необходимости просьбу о соблюдении конфиденциальности в отношении факта получения запроса о правовой помощи, его содержания и (или) любого действия, предпринятого в связи с запросом;
- л) любую другую информацию, которая может оказаться полезной запрашиваемой Стороне для исполнения запроса.

4. Если запрашиваемая Сторона считает, что сведения, указанные в запросе о правовой помощи, недостаточны для его исполнения, эта Сторона может запросить дополнительную информацию.

Статья 5

Языки

Запрос о правовой помощи, прилагаемые к нему документы и дополнительная информация в рамках настоящего Договора сопровождаются переводом на язык запрашиваемой Стороны либо по предварительной договоренности центральных органов Сторон на английский язык. Аналогичный порядок применяется к документам и информации, направляемым в качестве ответа на запрос.

Статья 6

Отказ или отсрочка в оказании правовой помощи

1. В правовой помощи отказывается, если:
 - а) исполнение запроса о правовой помощи может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой Стороны;
 - б) исполнение запроса о правовой помощи противоречит законодательству запрашиваемой Стороны или не соответствует положениям настоящего Договора;

- с) запрос о правовой помощи касается деяния, за которое лицо, привлекаемое к уголовной ответственности на территории запрашивающей Стороны, было осуждено или оправдано запрашиваемой Стороной в связи с тем же деянием или по которому истек срок давности;
 - д) запрос о правовой помощи касается преступления против военной службы, которое не является преступлением по общему уголовному законодательству;
 - е) запрашиваемая Сторона имеет веские основания полагать, что запрос о правовой помощи представлен с целью преследования лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, национальности или по политическим убеждениям либо положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин.
2. Ссылка на банковскую или налоговую тайну не может служить абсолютным основанием для отказа в оказании правовой помощи.
 3. Запрашиваемая Сторона может отсрочить или отказать в исполнении запроса о правовой помощи, если считает, что его исполнение может нанести ущерб или затруднить осуществление расследования или судебного разбирательства, проводимого на ее территории.
 4. Перед принятием решения об отсрочке или отказе в исполнении запроса о правовой помощи запрашиваемая Сторона рассматривает вопрос о том, может ли правовая помощь быть оказана на условиях, которые она считает необходимыми. Если запрашивающая Сторона соглашается на оказание правовой помощи на таких условиях, она обязуется соблюдать их.
 5. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе в оказании правовой помощи или ее отсрочке, она уведомляет об этом запрашивающую Сторону через ее центральный орган с указанием причины такого решения.

Статья 7

Действительность документов

1. Документы, представленные в рамках настоящего Договора и удостоверенные гербовой печатью компетентного органа или центрального органа направляющей Стороны, принимаются без их легализации или иной формы заверения.
2. По просьбе запрашивающей Стороны документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть заверены иным образом, указанным в запросе о правовой помощи, если это не противоречит законодательству запрашиваемой Стороны.
3. Для целей настоящего Договора документы, которые являются официальными на территории одной Стороны, признаются таковыми и на территории другой Стороны.

Статья 8

Конфиденциальность и ограничения в использовании информации

1. Запрашиваемая Сторона по просьбе центрального органа запрашивающей Стороны обеспечивает в соответствии со своим законодательством конфиденциальность в отношении факта получения запроса о правовой помощи, его содержания или любого действия, предпринятого в связи с запросом, за исключением тех случаев, когда огласка запроса является необходимой для его исполнения.
Если при исполнении запроса о правовой помощи возникает необходимость снятия этого ограничения, запрашиваемая Сторона в письменной форме запрашивает разрешение запрашивающей Стороны, без которого запрос не исполняется.
2. Запрашивающая Сторона без предварительного разрешения запрашиваемой Стороны не использует информацию или доказательства, полученные в рамках настоящего Договора, для иных целей, кроме указанных в запросе о правовой помощи.

3. В случае если запрашивающей Стороне понадобится передать огласке и использовать полностью или частично полученные информацию или доказательства для целей, не указанных в запросе о правовой помощи, она запрашивает соответствующее разрешение у запрашиваемой Стороны, которая может согласиться или отказать полностью или частично в таком разрешении.

Статья 9

Исполнение запросов о правовой помощи

1. Исполнение запросов о правовой помощи осуществляется в соответствии с законодательством запрашиваемой Стороны и положениями настоящего Договора.

По просьбе запрашивающей Стороны запрашиваемая Сторона оказывает правовую помощь в форме и в соответствии со специальной процедурой, которые указаны в запросе о правовой помощи, если это не противоречит законодательству запрашиваемой Стороны.

2. Если запрашивающая Сторона обращается с просьбой о присутствии представителей ее компетентных органов при исполнении запроса о правовой помощи, запрашиваемая Сторона уведомляет ее о своем решении. В случае положительного решения запрашивающая Сторона заблаговременно уведомляется о времени и месте исполнения запроса о правовой помощи.
3. Центральный орган запрашиваемой Стороны своевременно направляет полученные в результате исполнения запроса о правовой помощи информацию и доказательства центральному органу запрашивающей Стороны.
4. Если невозможно исполнить запрос о правовой помощи полностью или частично, центральный орган запрашиваемой Стороны незамедлительно сообщает об этом центральному органу запрашивающей Стороны и информирует о причинах, препятствующих исполнению запроса.

Статья 10

Вручение документов

1. Во исполнение запроса о правовой помощи центральный орган запрашиваемой Стороны незамедлительно осуществляет или организует вручение процессуальных документов.
2. Запрашивающая Сторона передает запрос о вручении процессуальных документов, которые предусматривают ответ или явку на территорию запрашивающей Стороны, в разумные сроки до намеченных ответа или явки.
3. Исполнение запроса о вручении процессуальных документов подтверждается документом о вручении с указанием даты и подписью адресата или заявлением компетентного органа запрашиваемой Стороны, в котором подтверждаются факт, дата и порядок вручения. Запрашивающая Сторона незамедлительно информируется о вручении документов.

Статья 11

Получение доказательств на территории запрашиваемой Стороны

1. Запрашиваемая Сторона в соответствии со своим законодательством получает на своей территории показания свидетелей и потерпевших, заключения экспертов, документы, предметы и другие доказательства, указанные в запросе, и передает их запрашивающей Стороне.
2. Представителям компетентных органов запрашивающей Стороны, присутствующим при исполнении запроса, разрешается формулировать вопросы, которые могут быть заданы соответствующему лицу через представителя компетентного органа запрашиваемой Стороны.
3. Запрашивающая Сторона соблюдает любые условия, оговоренные запрашиваемой Стороной в отношении передаваемых ей документов и предметов, в том числе касающиеся защиты прав третьих лиц на такие документы и предметы.

4. Запрашивающая Сторона возвращает по требованию запрашиваемой Стороны в возможно более короткий срок оригиналы документов и предметы, переданные ей в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 12

Представление информации, документов и предметов

1. Запрашиваемая Сторона представляет запрашивающей Стороне копии документов и информацию государственных органов, которые в соответствии с ее законодательством являются общедоступными.
2. Запрашиваемая Сторона может в соответствии со своим законодательством представить запрашивающей Стороне любые информацию, документы и предметы, находящиеся во владении государственного органа, не имеющие общего доступа в той степени и на тех же условиях, как они были бы доступны ее собственным правоохранительным и судебным органам.

Статья 13

Обыск и выемка

1. Запрашиваемая Сторона в той мере, в какой позволяет ее законодательство, исполняет запросы об обыске, выемке и передаче запрашивающей Стороне любых материалов, имеющих отношение к расследованию или иным процессуальным действиям в связи с производством по уголовному делу в запрашивающей Стороне, при условии, что соответствующий запрос включает в себя достаточно информации, чтобы в соответствии с законодательством запрашиваемой Стороны такие действия были обоснованными.
2. Запрашиваемая Сторона представляет информацию, которая может быть необходима запрашивающей Стороне, относительно результатов любого обыска, места изъятия, обстоятельств изъятия и последующего хранения изъятых материалов.

3. Запрашивающая Сторона соблюдает любые условия, оговоренные запрашиваемой Стороной в отношении любых изъятых материалов, передаваемых запрашивающей Стороне.

Статья 14

Установление местонахождения и идентификация лиц и предметов

Компетентные органы запрашиваемой Стороны предпринимают по запросу о правовой помощи предусмотренные ее законодательством меры для установления местонахождения и идентификации лиц и предметов.

Статья 15

Вызов свидетелей, потерпевших и экспертов на территорию запрашивающей Стороны

1. Если запрашивающая Сторона представляет запрос о вызове лица для дачи показаний, проведения экспертизы или иных процессуальных действий на своей территории, запрашиваемая Сторона сообщает этому лицу о приглашении запрашивающей Стороны явиться в ее компетентные органы.
2. Запрос о вызове лица должен содержать сведения об условиях и порядке оплаты расходов, связанных с явкой вызываемого лица, а также перечень гарантий, которые предоставляются ему в соответствии со статьей 16 настоящего Договора.
3. Запрос о вызове лица не должен содержать угрозы применения принуждения или наказания в случае неявки этого лица на территорию запрашивающей Стороны.
4. Вызываемое лицо добровольно принимает решение о явке. Центральный орган запрашиваемой Стороны незамедлительно информирует центральный орган запрашивающей Стороны о решении этого лица.

Статья 16

Гарантии, предоставляемые вызываемому лицу

1. Лицо, явившееся по вызову в компетентный орган запрашивающей Стороны, не может независимо от его гражданства быть привлечено к уголовной или административной ответственности, взято под стражу или подвергнуто ограничению свободы или наказанию за деяние, совершенное до его въезда на территорию запрашивающей Стороны.
2. Вызванное лицо утрачивает право на неприкосновенность, предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи, в том случае, если оно, имея возможность покинуть территорию запрашивающей Стороны, не сделало этого в течение 15 суток со дня вручения ему письменного уведомления о том, что его присутствие перестало быть необходимым для соответствующего компетентного органа, или, покинув эту территорию, впоследствии возвратилось на нее.
3. Вызванное лицо не может быть принуждено к даче показаний по делу, не указанному в запросе.

Статья 17

Передача на время лиц, содержащихся под стражей

(в том числе отбывающих наказание в виде лишения свободы)

1. Лицо, содержащееся под стражей (в том числе отбывающее наказание в виде лишения свободы), независимо от его гражданства может быть с согласия центрального органа запрашиваемой Стороны передано на время запрашивающей Стороне для дачи показаний в качестве свидетеля или потерпевшего либо для производства иных процессуальных действий, указанных в запросе о правовой помощи, при условии, что это лицо будет возвращено запрашиваемой Стороне в определенные ею сроки.
2. Первичный срок, на который лицо может быть передано, не может превышать 90 дней. По обоснованному ходатайству центрального органа запрашивающей Стороны срок пребывания переданного лица может быть продлен центральным органом запрашиваемой Стороны.

3. Порядок и условия передачи и возврата лица согласовываются центральными органами Сторон.
4. В передаче лица отказывается в случаях, если:
 - а) лицо, содержащееся под стражей (в том числе отбывающее наказание в виде лишения свободы), не дает на это письменного согласия;
 - б) необходимо участие этого лица в уголовном судопроизводстве, осуществляемом на территории запрашиваемой Стороны;
 - в) передача продлит срок пребывания лица под стражей (отбывания наказания в виде лишения свободы).
5. Запрашивающая Сторона обязана содержать переданное лицо под стражей, пока остается в силе решение компетентного органа запрашиваемой Стороны о его содержании под стражей. В случае освобождения из-под стражи лица, переданного по решению запрашиваемой Стороны, запрашивающая Сторона применяет к этому лицу положения статей 15, 16 и 18 настоящего Договора.
6. Время пребывания переданного лица вне территории запрашиваемой Стороны засчитывается в общий срок его содержания под стражей (в том числе в срок отбывания наказания в виде лишения свободы).
7. Если содержащееся под стражей лицо (в том числе отбывающее наказание в виде лишения свободы) не даст согласия явиться в запрашивающую Сторону, оно не будет за это подвергнуто мерам принуждения или наказанию.

Статья 18

Защита лица, явившегося по вызову или переданного на территорию запрашивающей Стороны

В случае необходимости запрашивающая Сторона обеспечивает защиту лица, явившегося по вызову или переданного на ее территорию в соответствии со статьями 15 и 17 настоящего Договора.

Статья 19

Особые случаи оказания правовой помощи

Запрашиваемая Сторона представляет выписки из уголовных дел и (или) имеющие к ним отношение документы или предметы, которые необходимы для расследования и (или) судебного разбирательства, если ее компетентные органы могут получать их в соответствующих случаях, за исключением документов и предметов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

Статья 20

Осуществление мер по замораживанию, изъятию, аресту, конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности, и средств совершения преступления

1. Стороны в соответствии со своим законодательством оказывают взаимную правовую помощь в выявлении, замораживании, аресте, изъятии и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности, и средств совершения преступления.

В целях настоящего Договора под доходами, полученными в результате преступной деятельности, понимаются денежные средства или иное имущество, полученное в результате совершения преступления, выручка и другие выгоды, полученные от таких доходов, от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы, полученные в результате преступной деятельности, или от имущества, к которому были приобщены доходы, полученные в результате преступной деятельности.

2. На основании полученного запроса о правовой помощи запрашиваемая Сторона принимает меры к установлению того, находятся ли под ее юрисдикцией доходы, полученные в результате преступной деятельности, или средства совершения преступления, информирует запрашивающую Сторону о результатах такого розыска и принимает меры по выявлению денежных средств и имущества, отслеживанию финансовых операций и получению иной информации или доказательств, которые могут способствовать обеспечению возврата доходов, полученных в результате преступной деятельности. В

запрос о проведении указанных действий запрашивающая Сторона информирует запрашиваемую Сторону об основаниях, позволяющих полагать, что такие доходы или средства совершения преступления могут быть обнаружены в юрисдикции запрашиваемой Стороны.

3. В случае обнаружения в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи доходов, полученных в результате преступной деятельности, или средств совершения преступления запрашиваемая Сторона на основании полученного запроса исполняет решение о замораживании или паложении ареста, вынесенное компетентным органом запрашивающей Стороны, или принимает меры в соответствии со своим законодательством в целях предотвращения любых действий с такими доходами или средствами совершения преступления, передачи или распоряжения ими до принятия в их отношении окончательного ршения судом запрашивающей или запрашиваемой Стороны.

4. Запрашиваемая Сторона в соответствии со своим законодательством исполняет вступившее в силу вынесенное компетентным органом запрашивающей Стороны решение об изъятии и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности, выручки и других выгод, полученных от таких доходов, от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы, полученные в результате преступной деятельности, или от имущества, к которому были приобщены доходы, полученные в результате преступной деятельности, а также средств совершения преступления.

Положения настоящей статьи распространяются на решения о конфискации, вынесенные в рамках уголовного, административного и гражданского судопроизводства.

5. При реализации положений настоящей статьи должны соблюдаться права добросовестных третьих лиц - приобретателей в соответствии с законодательством запрашиваемой Стороны.

6. На основании запроса запрашивающей Стороны запрашиваемая Сторона в соответствии со своим законодательством и согласованными центральными органами Сторон условиями может передать запрашивающей Стороне доходы, полученные в результате преступной деятельности, или средства совершения преступления.

Статья 21

Расходы

1. Запрашиваемая Сторона принимает на себя обычные расходы по исполнению запросов о правовой помощи, за исключением следующих расходов, которые несет запрашивающая Сторона:
- а) расходы, связанные с проездом лиц на ее территорию и обратно в соответствии со статьями 15 и 17 настоящего Договора и их пребыванием на этой территории, а также иные расходы, связанные с обеспечением безопасности, предусмотренные для этих лиц;
 - б) расходы и гонорары экспертов;
 - в) расходы, связанные с проездом, пребыванием и присутствием представителей компетентных органов запрашивающей Стороны при исполнении запроса в соответствии с пунктом 2 статьи 9 настоящего Договора;
 - г) расходы по перевозке переданных предметов с территории запрашиваемой Стороны на территорию запрашивающей Стороны и их возвращению.
2. Если исполнение запроса о правовой помощи требует существенных или чрезвычайных расходов, центральные органы Сторон проводят консультации с целью определения условий, на которых может быть исполнен запрос, а также порядка покрытия расходов.

Статья 22

Консультации и разрешение споров

1. Стороны по предложению одной из них проводят консультации по вопросам толкования и применения настоящего Договора в целом или в отношении конкретного запроса о правовой помощи.

2. Спорные вопросы, возникающие при толковании и применении настоящего Договора, разрешаются путем дипломатических переговоров.

Статья 23

Заключительные положения

1. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения, которые вступают в силу в порядке, установленном в пункте 2 настоящей статьи.
2. Настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего уведомления Сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
3. Настоящий Договор прекращает свое действие по истечении 180 дней с даты получения по дипломатическим каналам одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить его действие.
4. Прекращение действия настоящего Договора не является основанием для неисполнения запросов о правовой помощи, направленных до даты прекращения действия настоящего Договора.

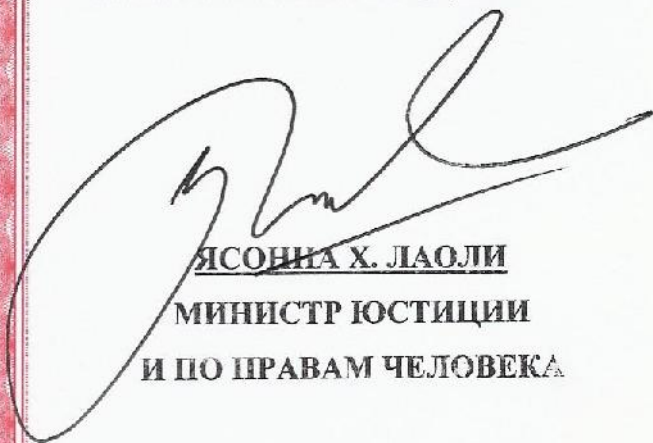
В подтверждение чего нижеподписавшиеся, будучи должным образом на то уполномочены Сторонами, подписали настоящий Договор.

vi



Совершено в г. Москве 13 Декабря 2019 года в двух экземплярах, каждый на индонезийском, русском и английском языках, при этом все тексты имеют одинаковую силу. В случае расхождения в толковании используется текст на английском языке.

ЗА РЕСПУБЛИКУ ИНДОНЕЗИЮ



ЯСОННА Х. ЛАОЛИ
МИНИСТР ЮСТИЦИИ
И ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

ЗА РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ



АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
КОНОВАЛОВ
МИНИСТР ЮСТИЦИИ

vi





REPUBLIK INDONESIA

**TREATY
BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE RUSSIAN FEDERATION
ON
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS**

The Republic of Indonesia and the Russian Federation hereinafter referred to as "the Parties"

RECOGNIZING the existing friendly relations and cooperation between the Parties,

DESIRING to provide legal framework for more effective cooperation between the Parties in combating crime,

INTENDING to extend to each other widest measures of cooperation in the area of mutual legal assistance in criminal matters, by concluding the present Treaty,

ON the basis of respect of sovereign equality and territorial integrity, non-interference with internal affairs and mutual benefit,

HAVE AGREED as follows:

Article 1
Obligation to grant legal assistance

1. The Parties shall, in accordance with this Treaty, grant to each other mutual legal assistance in criminal matters (hereinafter referred to as "legal assistance").
2. Legal assistance is provided in accordance with this Treaty if the offence, in connection with which the request was issued, is criminally punishable according to the law of both Parties. The Requested Party may upon its own consideration grant legal assistance also in case the offence, in connection with which the request was received, is not criminally punishable under its legislation.
3. The purpose of this Treaty is exclusively granting legal assistance by one Party to the other Party. The provisions of this Treaty shall not give rise to a right for a natural or legal person to obtain or exclude any evidence or to prevent the execution of a request.
4. This Treaty shall not grant to competent authorities of one Party the right to exercise in the territory of the other Party powers which fall exclusively within the competence of that other Party.
5. This Treaty shall apply to requests for legal assistance, presented after the entry into force of this Treaty even if the corresponding act or omission took place before this date.
6. Legal assistance may also be granted in connection with investigations, prosecutions or proceedings relating to criminal offences concerning taxation/fiscal and customs.

Article 2
Scope of application

1. Legal assistance shall include:
 - a. service of procedural documents;
 - b. taking evidence;
 - c. location and identification of persons and objects;
 - d. request for voluntary appearance of witnesses, victims and experts before the competent authority of the Requesting Party;
 - e. temporary transfer of persons in custody or serving sentences of imprisonment to participate in criminal proceedings in the territory of the Requesting Party as witnesses and victims or for the purpose of other criminal proceedings indicated in the request;
 - f. taking measures on freezing, restrain, seizure/forfeiture, and confiscation of proceeds of crime and the instruments of crime;
 - g. transfer of documents, objects and other evidence;
 - h. granting permission to the representatives of the competent authorities of the Requesting Party to be present at the execution of the request;
 - i. search and seizure;
 - j. providing information, documents and objects;
 - k. any other forms of legal assistance consistent with the objectives of this Treaty and not inconsistent with the law of the Requested Party.

2. This Treaty shall not apply to:
 - a. the arrest or detention of any person with a view to the extradition of that person;
 - b. the transfer of persons in custody to serve sentences; and
 - c. the transfer of proceedings in criminal matters.

Article 3
Central and Competent Authorities

1. In order to provide for the appropriate cooperation of the Parties in the framework of this Treaty, Central Authorities for the Parties shall be appointed.

For the Republic of Indonesia the Central Authority shall be:

The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

For the Russian Federation the Central Authorities shall be:

The Ministry of Justice of the Russian Federation for purposes connected with the proceedings of the courts of the Russian Federation;

The General Prosecutor's Office for all other purposes of granting legal assistance.

2. The competent authorities are the authorities duly authorized by each Party requested.
3. The Parties shall promptly notify each other through diplomatic channels in case of any change of their Central Authorities and their competences.
4. The Central Authorities of the Parties shall directly transmit and receive all requests for legal assistance provided for in this Treaty and responses to them.
5. The central authorities of the Parties shall execute the request for legal assistance directly or transmit it to the competent authority for execution.

If a central authority transmits the request for execution to a competent authority, it shall ensure prompt and appropriate execution of this request by the competent authority.

Article 4

Form and contents of the request

1. A request for legal assistance shall be made in writing.
2. The Requested Party shall immediately receive the request for the execution upon its delivering by telex, facsimile, electronic mail or other such type of communication and the original of the request shall be submitted promptly thereafter by the Requesting Party. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the results of the execution of the request only with the condition that it receives the original of the request.
3. Request for legal assistance shall contain:
 - a. the name of the competent authority requesting legal assistance;
 - b. the purpose of the request and description of the requested legal assistance;
 - c. a description of the offence in connection with which the inquiry, the investigation or the proceedings are conducted, legal qualification, the text of the relevant law in terms of which the offence is criminally punishable, and also if possible the nature and extent of the loss or damage caused as a result of this offence;
 - d. reasons for use and a description of any particular procedures that the Requesting Party wishes to be followed in execution of the request;
 - e. identity of the persons who are the subjects of the inquiry, the investigation or the proceedings;
 - f. any time limit within which compliance with the request is desired by the Requesting Party;
 - g. identity, including full names, family names (middle names) and addresses and also if possible telephone numbers, of the persons who are to be notified and their connection to the investigation or proceedings in progress;
 - h. indication of the location and description of the place, where inspection and search is required, and of the objects to be seized;

- i. questions to be asked in order to gather evidence in the Requested Party;
 - j. in case of an indication that the presence of representatives of the competent authorities of the Requesting Party is desired, their full names and official designations as well as grounds for their presence;
 - k. the need, if any, for confidentiality of the fact that the request was received of its contents and/or of any action undertaken in connection with the request;
 - l. any other information that might be useful to the Requested Party in order to execute the request.
4. If the Requested Party considers that the information contained in the request is insufficient for its execution, that Party may request additional information.

Article 5

Languages

Request for legal assistance, its supporting documents and additional information forwarded in accordance with this Treaty shall be accompanied by translation into the language of the Requested Party, or, subject to preliminary agreement of the Central Authorities of the Parties, into English. The same procedure shall be applied to the documents and information forwarded in response to such request.

Article 6

Refusal or postponement of requests

1. Legal assistance shall be refused if:
 - a. the execution of the request would impair the sovereignty, security, public order or other essential interests of the Requested Party;
 - b. the execution of the request is contrary to the law of the Requested Party or does not comply with the provisions of this Treaty;

- c. the request relates to the offence for which the person accused of criminal offence in the Requesting Party was convicted or acquitted in the Requested Party in connection with the same offence, or for which the limitation period elapsed;
 - d. the request relates to a crime under military law that is not a crime under general criminal law;
 - e. the Requested Party has substantial reasons to believe that the request was submitted in order to prosecute the person on grounds of race, gender, faith, citizenship, ethnic origin or political convictions, or the position of that person may be prejudiced because of any of these causes.
2. Bank secrecy or confidentiality of taxation may not be invoked as the absolute ground for refusal to grant legal assistance.
 3. Legal assistance may be postponed or refused by the Requested Party if execution of the request would damage or impede an ongoing investigation or proceedings in the territory of the Requested Party.
 4. Before making a decision to postpone or refuse the execution of the request the Requested Party shall consider whether legal assistance may be granted subject to such conditions, as it deems necessary. If the Requesting Party accepts legal assistance subject to these conditions, it is obliged to comply with them.
 5. If the Requested Party decides to postpone execution of, or refuse to grant a request, it shall promptly inform the Requesting Party via its Central Authority and give reasons for that decision.

Article 7
Validity of the Documents

1. Documents transmitted pursuant to this Treaty and attested to by the seal of competent or Central Authority of the transmitting Party are admissible in evidence without further authorization or any other form of certification.
2. At the request of the Requesting Party, the documents transmitted within the framework of this Treaty, may be certified in any other form, as indicated in the request provided that is not contrary to the legislation of the Requested Party.
3. For the purposes of this Treaty the documents which are recognised as official in the territory of one Party shall be recognised as such in the territory of the other Party.

Article 8
Confidentiality and the limitations of use of information

1. The Requested Party upon request of the Central Authority of the Requesting Party shall provide in accordance with its legislation for the confidentiality of the fact of the receipt of the request for legal assistance, of its contents or any action taken pursuant to the request, excluding the cases when the breach of confidentiality of the request is necessary for its execution.
If the execution of the request makes it necessary to remove this limitation, the Requested Party shall in writing seek the permission of the Requesting Party, without which the request will not be executed.
2. The Requesting Party shall not use the information or evidence obtained under this Treaty without the prior permission of the Requested Party for purposes other than those indicated in the request for legal assistance.

3. In cases where the Requesting Party needs to disclose and use fully or in part the information or evidence for purposes other than those stated in the request, it shall seek the consent of the Requested Party, which may either agree or refuse, fully or partially, such permission, as the case may be.

Article 9

Execution of requests for legal assistance

1. Requests for legal assistance shall be executed in accordance with the laws of the Requested Party and the provision of this Treaty.
At the request of the Requesting Party, the Requested Party shall grant legal assistance in form and in accordance with any special procedure indicated in the request, insofar as it is not inconsistent with the laws of the Requested Party.
2. If the Requesting Party seeks the presence of the representatives of its competent authorities during the execution of a request, the Requested Party will inform the Requesting Party about its decision. In case of a positive decision, the Requesting Party will be informed beforehand of the time and the place of the execution of the request.
3. The Central Authority of the Requested Party will timely transmit the information and the evidence received consequent to the request to the Central Authority of the Requesting Party.
4. If it is not possible to execute the request in full or in part, the Central Authority of the Requested Party will immediately inform the Central Authority of the Requesting Party of such inability and also the reasons therefore.

Article 10

Service of Documents

1. In accordance with the request for legal assistance, the Central Authority of the Requested Party shall immediately serve or arrange the service of any procedural documents.
2. The Requesting Party shall transmit a request for the service for the document pertaining to a response or appearance in the territory of the Requesting Party within a reasonable time, before the scheduled response or appearance.
3. Execution of such request shall be confirmed by the document of service indicating the date and signature of the addressee or the statement of the competent authority of the Requested Party, confirming the fact, date and means of service. The Requesting Party shall be promptly informed of the service of documents.

Article 11

Taking of evidence in the Requested Party

1. In compliance with its laws, the Requested Party shall in its territory take testimony of witnesses, victims and experts or produce documents, items and evidence indicated in the request and transmit it to the Requesting Party.
2. The representatives of the competent authorities of the Requesting Party that are present at the execution of the request shall be allowed to formulate questions that may be put to the corresponding person through the representative of the competent authority of the Requested Party.
3. The Requesting Party shall observe any conditions imposed by the Requested Party in relation to any documents and objects which may be delivered to it, including conditions for the protection of third party interests in any such documents and objects.

v:

4. Upon a request by the Requested Party, the Requesting Party shall, as soon as possible, return the originals of documents and items delivered to it in accordance with Paragraph 1 of this Article.

Article 12

Provision of information, documents and objects

1. The Requested Party shall provide the Requesting Party with copies of documents and information of Governmental authorities, which under its laws are publicly available.
2. The Requested Party may, subject to its laws, provide the Requesting Party with any information, documents and objects in possession of a government department or agency but not publicly available, to the same extent and under the same conditions as they would be available to its own law enforcement and judicial authorities.

Article 13

Search and Seizure

1. The Requested Party shall, insofar as its law permits, carry out requests for search, seizure and delivery of any material to the Requesting Party which is relevant to an investigation or other proceedings in relation to the pending criminal matter in the Requesting Party, provided that the request includes information enough to justify such action under the laws of the Requested Party.
2. The Requested Party shall provide such information as may be required by the Requesting Party concerning the result of any search, the place of seizure, the circumstances of seizure and the subsequent custody of the material seized.

3. The Requesting Party shall observe any conditions imposed by the Requested Party in relation to any seized material which is delivered to the Requesting Party.

Article 14

Location and identification of persons and objects

The competent authorities of the Requested Party shall use its best efforts as provided for by its law to ascertain the location and identity of persons and objects specified in the request.

Article 15

Request for appearance of witnesses, victims and experts in the territory of the Requesting Party

1. If the Requesting Party submits a request for personal appearance to produce evidence, carry out expert examination or for other procedural measures in its territory, the Requested Party shall inform the person concerned of the request of the Requesting Party to appear before its competent authorities.
2. The request for the person to appear shall contain information on the conditions and requirements to cover cost and the expenses related to the appearance of the summoned person, as well as the list of guarantees which will be provided to the person under Article 16 of this Treaty.
3. The request for the person to appear shall not contain any threat to use coercive measures or penalty in case of a failure of the person to appear in the territory of the Requesting Party.
4. The summoned person will take the decision to appear voluntarily. The Central Authority of the Requested Party shall promptly inform the Central Authority of the Requesting Party of the person's response.

Article 16
Safe conduct

1. A person present before the competent authority in the Requesting Party notwithstanding its citizenship shall not be subjected to criminal prosecution or administrative responsibility, detained or subjected to any other restriction of personal liberty or punishment in the territory of this Party for any acts which preceded that person's entry into the territory of the Requesting Party.
2. The summoned person shall lose his/her right to inviolability provided for in the Paragraph 1 of this Article if a person, being free to leave the territory of the Requesting Party, has not left it within a period of 15 days after being notified in writing that the person's attendance is no longer required by the relevant competent authority or, having left that territory, has voluntarily returned.
3. The summoned person shall not be forced to present evidence on any other case than that indicated in the request.

Article 17
Temporary transferring persons in custody
(including those serving punishment in the form of imprisonment)

1. A person in custody (including a person serving a sentence in the form of imprisonment) notwithstanding citizenship, with the consent of the Central Authority of the Requested Party may be temporarily transferred to the Requesting Party to give evidence as a witness or a victim or to assist in other proceedings indicated in the request provided that the person is returned to the Requested Party within the time limit imposed by it.

2. Initial term for which the person may be transmitted shall not exceed 90 days. Upon the request of the Central Authority of the Requesting Party, based on substantial grounds, the term of stay of the transferred person may be extended by the Central Authority of the Requested Party.
3. The order and the conditions of transfer and return of the person shall be coordinated by the Central Authorities of the Parties.
4. The transfer of the person shall be refused:
 - a. if the person in custody (including the person serving a sentence in the form of imprisonment) does not give consent in writing to this;
 - b. if participation of this person in the criminal proceedings in the territory of the Requested Party is necessary;
 - c. if the transfer extends the period of custody (service of sentence in the form of imprisonment) of the person.
5. The Requesting Party shall hold the transmitted person in custody insofar as the decision of the competent authority of the Requesting Party to hold that person in custody is in force. In case of release of the person in custody upon the decision of the Requested Party, the Requesting Party shall use the provisions of Articles 15, 16 and 18 of this Treaty in relation to that person.
6. The period of transfer of the person outside the territory of the Requested Party is regarded as part of being in custody (including service of sentence in the form of imprisonment).
7. If the person in custody (the person serving the sentence in the form of imprisonment included) does not consent to appear before the Requesting Party that person by reason thereof shall not be liable to any measure of compulsion or penalty.

Article 18

Protection of the person appearing upon request or transferred to the territory of the Requesting Party

If necessary, the Requesting Party shall provide for the protection of the person appearing upon request or transferred to its territory in accordance with Articles 15 and 17 of this Treaty.

Article 19

Special cases of granting legal assistance

The Requested Party shall submit upon request extracts from the criminal case-files and/or documents and items related to them that are necessary for the investigation and/or judicial proceedings if its competent authorities can receive them in similar cases, except documents or items containing secret of the State.

Article 20

Performance of measures on freezing, seizure/forfeiture, restrain and confiscation of proceeds of crime and the instruments of crime

1. The Parties, in accordance with their laws, shall assist each other in tracing, freezing, seizing/forfeiting, restraining and confiscating proceeds and instruments of crime.

For the purposes of this Treaty, "proceeds of crime" mean property including monetary funds or other property derived from, directly or indirectly, as result of crime, income and other benefits received from these proceeds, or property into which the proceeds were converted or transformed, or property to which the proceeds were adjoined.

2. The Requested Party shall, upon request, endeavour to ascertain whether any proceeds of crime or instruments of crime are located within its jurisdiction, notify the Requesting Party of the results of its inquiries, and take measures for revealing the monetary funds and property, tracking financial operations and receiving any other information or evidence which

can facilitate securing of return of the proceeds of crime. In making the request, the Requesting Party shall notify the Requested Party of the basis of its belief that such proceeds or instruments may be located in its jurisdiction.

3. Where, pursuant to paragraph 2 of this Article, suspected proceeds or instruments of crime are found, the Requested Party shall upon request give effect to a restraining or freezing order made by a competent authority of the Requesting Party or take such measures as are permitted by its law to prevent any dealing in, transfer or disposal of those suspected proceeds or instruments of crime, pending a final determination in respect of those proceeds or instruments by a court of the Requesting Party or the Requested Party.
4. The Requested Party shall, to the extent permitted by its law, give effect to a final order made by a competent authority of the Requesting Party on seizure/forfeiture or confiscation of the proceeds of crime, monetary funds or other property received as a result of crime, income and other benefits received from these proceeds, or property into which the proceeds of crime were converted or transformed, or property to which the proceeds of crime were adjoined, or of the instruments of crime.
The provisions of this Article also apply to decisions on confiscation rendered within criminal, administrative and civil proceedings.
5. In the application of this Article, the rights of bona fide third parties shall be respected under the law of the Requested Party.
6. At the request of the Requesting Party, the Requested Party may, to the extent permitted by its laws and under any terms and conditions agreed to by the Central authorities of the Parties, transfer the proceeds or instruments of crime to the Requesting Party.

Article 21
Expenses

1. The Requested Party shall meet the regular costs of executing the requests for legal assistance, except that the Requesting Party shall bear:
 - a. the expenses associated with the travel of persons to and from its territory in accordance with Article 15 and 17 of this Treaty and their presence in that territory, as well as other expenses including those incurred in relations to the protection of those persons and payments due to those persons;
 - b. the expenses and fees of experts;
 - c. the expenses associated with the travel and presence of the representatives of the competent authorities of the Requesting Party at the execution of the request in accordance with Article 9 Paragraph 2 of this Treaty;
 - d. the expenses associated with the transition of transmitted objects from the territory of the Requested Party to the territory of the Requesting Party and back.

2. If execution of the request requires expenses of substantial or extraordinary nature, the Central Authorities of the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the requested assistance can be provided, as well as the order of expenses regulation.

Article 22
Consultations and resolutions of disputes

1. The Parties at the request of either of them shall consult on interpretation or application of this Treaty, either generally or in relation to a particular request.

2. Disputed issues resulting from interpretation or application of this Treaty shall be resolved through diplomatic negotiations.

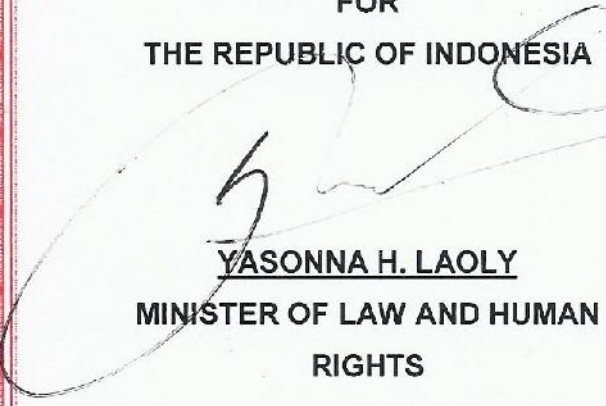
Article 23
Final provisions

1. Upon the mutual agreement of the Parties, this Treaty may be amended, and such amendments shall enter into force in accordance with the procedure provided for in Paragraph 2 of this Article.
2. This Treaty shall enter into force 30 days after the last date of which the Parties have notified each other through diplomatic channels that their respective domestic legal requirements for the entry into force of this Treaty have been complied with.
3. The present Treaty shall terminate 180 days after the date either of the Parties has received through diplomatic channels a written notification by the other Party of its intention to terminate it.
4. Termination of this Treaty shall not be the ground for non-execution of any request for legal assistance received prior to the date of termination of this Treaty.

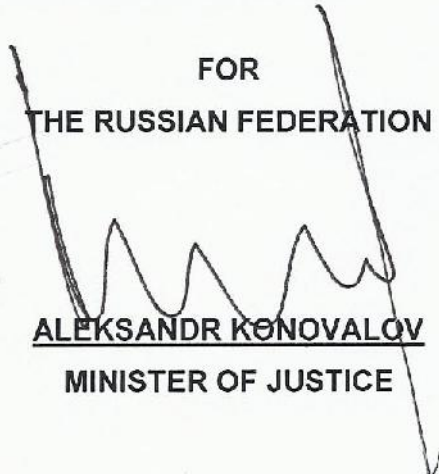
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their Respective States, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at Moscow on the 13th day of, December 2019 in Indonesian, Russian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR
THE REPUBLIC OF INDONESIA


YASONNA H. LAOLY
**MINISTER OF LAW AND HUMAN
RIGHTS**

FOR
THE RUSSIAN FEDERATION


ALEKSANDR KONOVALOV
MINISTER OF JUSTICE



Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nomor : 0095/CTC/09/2020/52
Number




Sahadatun Donatirin
NIP. 19740603 199803 2 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : September 2020
Date